

KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal. 19	8 Januari 2020	Tarif 10 Ruas Segera Disesuaikan	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan penyesuaian tarif 10 ruas tol akan diselenggarakan tahun ini
2	Bisnis Indonesia, Hal. 22	8 Januari 2020	Tol ke Kertajati Perlu Dipercepat	Dalam menunjang operasional Bandara Internasional Kertajati, Kementerian Perhubungan meminta Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu) sepanjang 62,6 KM segera dioperasikan
3	Kompas, Hal 1	8 Januari 2020	Keselamatan Jadi Prioritas	Keselamatan warga di lokasi rawan longsor menjadi perhatian Presiden Joo Widodo. Peringatan dini atas kemungkinan terjadi bencana perlu diintensifkan lagi
4	Koran Tempo, Hal. metro 1	8 Januari 2020	Pusat Gendeng Tiga Provinsi Bahas Banjir	Pembahasan program dan proyek penanganan ancaman banjir DKI, Jawa Barat, dan Banten digelar sesuai masa rehabilitasi

Judul	Tarif 10 Ruas Segera Disesuaikan	Tanggal	8 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 19		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan penyesuaian tarif 10 ruas tol akan diselenggarakan tahun ini		

► JALAN TOL

Tarif 10 Ruas Segera Disesuaikan

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan penyesuaian tarif 10 ruas tol akan diselenggarakan tahun ini, setelah tertunda pada tahun lalu. Penyesuaian tarif dari 10 ruas tol tersebut diketahui hanya tinggal menunggu terbitnya surat keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan secara umum proses penyesuaian tarif sudah selesai dan tinggal dilakukan pengecekan terakhir oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. "Harapan kita semuanya tuntas tahun ini, karena tahun depan ada juga daftar [ruas] tol yang harus kita kerjakan [penyesuaian tarifnya]," katanya, Selasa (7/1).

Menurutnya, penundaan penyesuaian tarif di beberapa ruas tol salah satunya dikarenakan masih dilakukannya pekerjaan konstruksi seperti perbaikan fisik atau sarana dan prasarana. Walhasil, Menteri PUPR memilih untuk menunda penerbitan

SK terkait penyesuaian tarif hingga pekerjaan tersebut rampung.

Menurutnya, 10 ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif, lima di antaranya sudah mencapai proses akhir, yaitu Tol Cawang - Tomang - Pluit, Tol Ujung Pandang Tahap I, Tol Bali-Mandara, Tol Pondok Aren - Serpong, dan Tol Gempol - Pandaan Tahap I.

Kemudian, sebanyak dua ruas tol yakni Tol Tangerang-Merak, dan Tol Pasirkoja-Soreang masih dalam proses permintaan persetujuan unit kerja eselon I di Kementerian PUPR.

Sedangkan tiga ruas tol lainnya yakni tol Palikanci, Tol Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa), dan Tol Surabaya-Gempol telah sampai pada proses penyusunan berita acara penyesuaian tarif.

Danang mengatakan pemerintah berencana menerapkan integrasi tarif untuk tiga ruas tol, yaitu jalan tol Jakarta—Cikampek, Jakarta—Cikampek II layang (*elevated*), dan Bekasi—Cawang—Kampung Melayu (Becakayu). Skema ini akan diterapkan setelah

perhitungan tarif tol Jakarta—Cikampek layang rampung.

Menurutnya, integrasi tarif dilakukan karena ketiga ruas tersebut melayani koridor yang sama, yaitu koridor Timur Jakarta. "Jadi dalam konteks pelayanan publik, ini perlu diintegrasikan," jelasnya.

Dia menerangkan, saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi terkait integrasi tarif di tiga ruas tol tersebut. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kemauan dan kemampuan membayar para pengguna jalan. Simulasi diharapkan tuntas pada pekan kedua Januari 2020 sehingga penerapan integrasi tarif bisa dilakukan pada bulan ini.

Namun, sebelum pemberlakuan tarif integrasi dimulai, BPJT akan memastikan kesempurnaan kondisi jalan tol Jakarta—Cikampek layang. Danang menyebut, sejak dibuka pada akhir Desember 2019 lalu, jalan tol layang sepanjang 36 kilometer tersebut banyak dikeluhkan pengguna jalan.

(Aprianus Doni T/Rivki Maulana)

Judul	Tol ke Kertajati Perlu Dipercepat	Tanggal	8 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 22		
Resume	Dalam menunjang operasional Bandara Internasional Kertajati, Kementerian Perhubungan meminta Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 62,6 KM segera dioperasikan		

► BANDARA JAWA BARAT

Tol ke Kertajati Perlu Dipercepat

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan meminta Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 62,6 km segera dioperasikan walaupun hanya sebagian untuk meningkatkan aksesibilitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan jalan tol yang menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka itu sudah selesai di beberapa seksi.

"Kita berharap sebelum Lebaran 2020 seksi 1, 2, 3 dan 6 sudah bisa digunakan. Jadi yang ke Kuningan bisa lewat Cisumdawu," paparnya kepada *Bisnis*, Selasa (7/1).

Dengan operasional jalan tol itu, Budi menyatakan akses menuju BIJB Kertajati bisa makin baik. Permintaan operasional sebagian jalan tol itu juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna mendukung

Bandara Kertajati.

Saat ini, penyelesaian jalan tol Cisumdawu seksi 1, 2, dan 3 sepanjang 32 km tinggal menghitung hari. Hal yang sama juga untuk jalan tol Cisumdawu seksi 6.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti mengatakan BIJB Kertajati sangat siap untuk melayani penerbangan embarkasi dan debarkasi haji 2020.

Kesiapan itu dikukuhkan lagi dengan keluarnya surat penetapan embarkasi dan debarkasi haji 2020 di BIJB Kertajati oleh Kementerian Agama.

"BIJB adalah bandara yang megah, fasilitasnya juga memadai, masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya akan merasa nyaman terbang ke Tanah Suci melalui bandara ini. Tidak perlu harus jauh-jauh ke Bandara Soekarno Hatta yang sudah sangat padat," kata Polana.

Dengan penetapan BIJB

Kertajati menjadi bandara embarkasi atau debarkasi haji 2020, jemaah haji Jawa Barat yang awalnya berangkat ke Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, mulai tahun ini akan terbang melalui bandara tersebut.

Demikian juga saat pulang dari Arab Saudi, imbuhnya, mereka akan mendarat di BIJB Kertajati. Tercatat kuota haji untuk Jawa Barat sebanyak 38.852 jemaah, yang akan terbagi dalam 97 kelompok terbang (kloter).

Polana mengimbau agar penyelenggara bandara BIJB terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah calon haji yang terbang perdana dari Bandara BIJB Kertajati.

"Keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan harus terus menjadi prioritas. Berikan kesan dan pengalaman terbaik buat para jemaah calon haji kita," ujarnya. (Rinaldi M. Azka/Rio Sandy Pradana)

Judul	Keselamatan Jadi Prioritas	Tanggal	8 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 1		
Resume	Keselamatan warga di lokasi rawan longsor menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Peringatan dini atas kemungkinan terjadi bencana perlu diintensifkan lagi		

Keselamatan Jadi Prioritas

Keselamatan warga di lokasi rawan longsor menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Peringatan dini atas kemungkinan terjadi bencana perlu diintensifkan lagi.

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta para camat untuk menyiapkan masyarakatnya yang bermukim di titik rawan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di Kabupaten Lebak, Banten. Kesiagaan semua pihak menjadi krusial karena cuaca ekstrem saat musim hujan masih berpeluang terjadi hingga bulan depan.

"Kami sampaikan sejak sebelum yang lalu agar semua gubernur, bupati, dan wali kota memberikan peringatan secara dini untuk tempat-tempat yang kemungkinan rawan terjadi longsor," kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kunjungan ke lokasi banjir bandang di Lebak, Selasa (7/1/2020).

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari. Sementara itu, banyak konsentrasi perumahan penduduk berada di titik rawan banjir dan longsor. Presiden mengatakan, di Kabupaten Bogor saja, titik longsor mencapai ratusan.

>> BACA JUGA:

Normalisasi

Normalisasi atau naturalisasi, masyarakat hanya ingin terbebas dari banjir.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/normalisasi

BACA JUGA HLM 18

Menurut Presiden, penyebabnya titik rawan bencana menuntut pemerintah daerah melalui instrumen sampai ke akar rumput memberikan peringatan kepada masyarakat setiap akan terjadi hujan lebat. "Saya kira yang paling penting kewaspadaan kita semua," kata Joko Widodo.

Presiden melanjutkan, masyarakat yang rumahnya terkena longsor akan direlokasi ke area yang aman. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah yang lama. Relokasi dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan pembangunan perumahan akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tambang ilegal

Di Lebak, Presiden menerima laporan bahwa penyebabnya adalah perambahan hutan untuk penambangan emas secara ilegal. "Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Bupati agar ini dihentikan. Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," ujarnya.

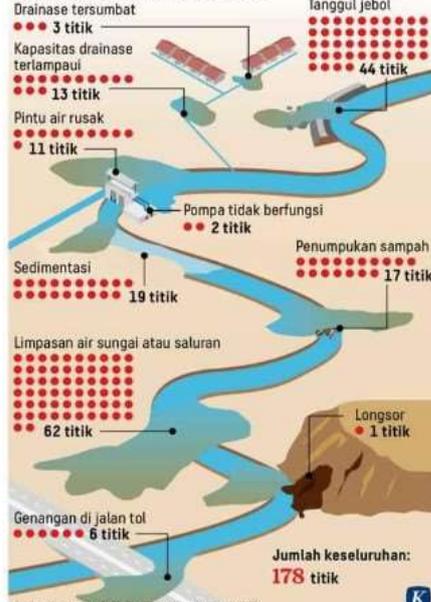
Di Lebak, sebagaimana dipaparkan Presiden, sebanyak 30 jembatan penghubung antardesa dan 19 sekolah rusak. Presiden menginstruksikan Kementerian PUPR agar membangunnya kembali dalam 3-4 bulan.

Di Jakarta, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saporis Soderjanto mengatakan, KLHK menuntun aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah hulu dan

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

Penyebab Banjir Menurut Kementerian PUPR

Berdasarkan survei Kementerian PUPR



Sumber: Kementerian PUPR, Data Kers Lebak, Kompas/BANI/PA

INFOGRAFI: PANDA

Keselamatan Jadi Prioritas

(Sambungan dari halaman 1)

daerah tangkapan air banjir. Aktivitas ini berpengaruh pada berkurangnya tutupan vegetasi dan peningkatan erosi sedimen yang menyebabkan penurunan kapasitas aliran.

"Sebagian besar daerah tangkapan air lokasi bencana memiliki kategori limpasan tinggi dan ekstrem (87,28 persen), serta kerawanan longsor rawan dan sangat rawan (81,45 persen). Ada pula tutupan lahan tak sesuai fungsi kawasan hutan, sebagian besar pertanian lahan kering campur," katanya.

Terkait keberadaan PETI, ia berharap dilakukan penertiban pada aktivitas itu. Selanjutnya, dilakukan reklamasi pada daerah bekas galian tambang.

Distribusi bantuan

Di Bogor, sejak Selasa subuh, hujan mengguyur Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg, dan Jasinga sehingga menyulitkan petugas mencapai desa terdampak banjir dan longsor.

Alat berat dibutuhkan petugas untuk menyingkirkan gelondongan kayu yang menutupi

jalan. Petugas hanya menggunakan gergaji mesin, kapak, sekop, dan tali untuk memotong dan menyingkirkan kayu. Hanya saja, tak semua desa bisa diakses alat berat karena medan cukup sulit.

Camat Jasinga Asep Aer Sukmaji mengatakan, pihaknya sudah memetakan wilayah yang terdampak paling parah untuk memudahkan distribusi bantuan. "Kami stop menerima pakaian karena sudah terlalu banyak. Kebutuhan saat ini obat, makanan, lilin, dan air."

Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan telah siap dengan logistik untuk pengungsi. "Kami harap warga di daerah rawan bencana tak kembali dulu ke rumahnya. Sementara di pengungsian dulu. Nanti kami kirim bantuan yang mencukupi ke setiap posko pengungsian," ujarnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke dinas kesehatan di seluruh Indonesia untuk mengutamakan pertolongan korban bencana alam. Urusan administrasi agar dikesampingkan.

Identifikasi sebab banjir

Kementerian PUPR mengidentifikasi penyebab banjir besar di wilayah Jabodetabek. Tercatat 178 titik banjir dan genangan pada 1 Januari 2020. Beberapa penyebab banjir ialah tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), dan pintu air rusak (11 titik).

Penyebab lainnya adalah pompa tidak berfungsi (2 titik), yakni di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi; sedimentasi (19 titik); penumpukan sampah (17 titik); limpasan air dari sungai atau saluran (62 titik); longsor (1 titik); dan genangan di jalan tol (6 titik).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, mengatakan, hasil survei lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, teridentifikasi 114 titik banjir atau genangan yang harus segera ditangani karena diperkirakan curah hujan tinggi masih terjadi pada 11-15 Januari 2020. (GIO/LAS/NAD/ICH)

Judul	Pusat Gandeng Tiga Provinsi Bahas Banjir	Tanggal	8 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal. metro 1		
Resume	Pembahasan program dan proyek penanganan ancaman banjir DKI, Jawa Barat, dan Banten digelar sesuai masa rehabilitasi		

METRO

Pusat Gandeng Tiga Provinsi Bahas Banjir

Pembahasan program dan proyek penanganan ancaman banjir DKI, Jawa Barat, dan Banten digelar sesuai masa rehabilitasi.

KYRI, 8 JANUARI 2020



Mas Menteri Koordinator (Kor) membahas rencana proyek penanganan banjir di pusat pengendalian banjir Tiga Provinsi, Jakarta, Banten.

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah akan menggelar rapat koordinasi pembahasan kebijakan penanganan banjir. Penyelarasan tersebut bakal memadukan tanggung jawab pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Setelah fase rehabilitasi banjir, akan dikumpulkan lagi. Sekarang masih tanggap darurat," kata Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sesuai rapat koordinasi penanggulangan banjir di kantornya, kemarin.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019 ini, persoalan banjir tak bisa ditangani secara parsial. Setiap kebijakan harus selaras antara pusat dan daerah. Pernyataannya juga untuk menjawab munculnya polemik antara pemerintah DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum tentang proyek normalisasi dan naturalisasi sungai.

Muhadjir mengatakan, selain pengelolaan daerah aliran dan wilayah sungai, kebijakan yang harus diselaraskan adalah penggunaan ruang terbuka hijau serta perlindungan lahan hutan. "Salah satu penyebab lemahnya penanganan banjir dan tanah longsor adalah akibat hilangnya daerah resapan air," ujar dia.

Pengelolaan lahan dan hutan ini juga menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo setelah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Sukajaya, Bogor; dan banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten. Satu sorotan presiden jatuh pada maraknya penebangan hutan dan eksploitasi lahan akibat tambang emas di Lebak.

Jokowi langsung meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim menghentikan izin tambang tersebut. "Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," kata dia.

Berdasarkan data pemerintah Lebak, banjir bandang menghancurkan 30 jembatan antardesa yang menjadi tumpuan akses transportasi warga setempat. Selain itu, 1.410 rumah dan 19 sekolah mengalami kerusakan berat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten juga mencatat 229.840,73 hektare lahan di provinsi paling barat Jawa itu berada dalam kondisi kritis. Lahan tersebut dinyatakan kritis akibat ketidakseimbangan antara penebangan dan penanaman pohon. "Sebanyak 70 persen terjadi di hutan produksi dan 30 persen terjadi di hutan negara," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PPH) DLHK Banten Heri Rahmat Isaeni. "Paling luas memang di Lebak."

Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten M. Juhriyadi. Menurut dia, penebangan pohon di daerah aliran sungai wilayah hulu diyakini sebagai penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Di Lebak, penebangan cukup banyak dilakukan di hulu Sungai Ciberang yang berada di Pegunungan Halimun, juga Gunung Luhur, Citorek. "Jadi, hujan yang turun ke daratan, semua ke anak Sungai Ciberang," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penanganan banjir harus merata di semua wilayah, hulu hingga hilir. Menurut dia, jika semua wilayah tak memiliki kebijakan yang mampu menjawab ancaman banjir, bencana akan tetap terus terjadi.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data penurunan daerah resapan air di Ibu Kota. Jakarta tercatat memiliki 55,16 hektare daerah resapan air yang mulai menjadi permukiman sejak 2009. Selain itu, jumlah situ di Ibu Kota dan sekitarnya juga menurun dari lebih dari 1.500 titik, dan tersisa 178 situ. "Masalah banjir tak bisa diselesaikan Jakarta sendiri. Harus ada pemulihan," kata Anies.

IMAM HAMDI | WASI'UL ULUM (SERANG) | FRANCISCO ROSARIANS

Agar Lepas Pulih

PEMERINTAH membantu korban banjir di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat lewat sejumlah bantuan dari berbagai lembaga. Berikut ini di antaranya.

Kementerian Sosial

- ▶ Untuk pemerintah DKI Jakarta Rp 1,9 miliar
- ▶ Untuk pemerintah Jawa Barat Rp 1,5 miliar
- ▶ Untuk pemerintah Banten Rp 720 miliar
- ▶ Untuk korban meninggal Rp 15 juta per orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- ▶ Untuk Pemerintah Kota Bekasi Rp 1 miliar
- ▶ Untuk korban dengan rumah rusak berat Rp 50 juta
- ▶ Untuk korban dengan rumah rusak sedang Rp 25 juta
- ▶ Untuk korban dengan rumah rusak ringan Rp 10 juta
- ▶ Untuk keluarga dengan rumah rusak Rp 500 ribu per bulan